

LANGKAH STRATEGIS PENINGKATAN KUALITAS, RELEVANSI DAN PEMERATAAN PENDIDIKAN DI INDONESIA DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN

SULISTYANDARI

ABSTRAK

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia. Pendidikan yang berkualitas dapat menciptakan generasi yang unggul dan kompetitif dalam menghadapi tantangan yang terjadi di masa mendatang. Rendahnya kualitas lulusan merupakan salah satu bukti bahwa pendidikan di Indonesia belum secara optimal dikembangkan. Relevansi pendidikan dalam hal substansi dengan kebutuhan masyarakat dinilai masih rendah. Dunia industry mengeluhkan masih kurang relevannya kompetensi lulusan pendidikan tinggi dengan dunia kerja, tenaga kerja tidak relevan dengan industry. Pembangunan pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Pembangunan pendidikan nasional yang akan dilakukan secara jelas menekankan pentingnya pendidikan sebagai salah satu cara untuk penanggulangan kemiskinan, peningkatan keadilan, dan kesetaraan gender, pemahaman nilai-nilai budaya dan multikulturalisme serta peningkatan kesejahteraan.

Kata Kunci : kualitas, relevansi, pemerataan, pendidikan, kesejahteraan

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia, bahkan kinerja pendidikan yaitu gabungan angka partisipasi kasar (APK) jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi dan angka melek aksara digunakan sebagai variabel dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bersama-sama dengan variabel kesehatan dan ekonomi. Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) yang dirilis pada tanggal 5 Oktober 2009 Indonesia berada pada kategori Pembangunan Manusia Menengah dengan Indeks IPM 0,734 dan berada di urutan ke-111 dari 180 negara. Posisi ini kalah jauh dari negara tetangganya Malaysia, yang berada pada kategori Pembangunan Manusia Tinggi dengan indeks IPM 0,829, dan berada pada urutan ke-66. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Terlihat jelas bagaimana kondisi pendidikan bangsa kita dewasa ini.

Saat ini kualitas pendidikan di Indonesia berada di posisi 108 di dunia dengan skor 0,603. Secara umum kualitas pendidikan di tanah air berada di bawah Palestina, Samoa dan Mongolia. Hanya sebanyak 44% penduduk menuntaskan pendidikan menengah. Sementara 11% murid gagal menuntaskan pendidikan alias keluar dari sekolah. Pemerintah akan menempuh berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam sektor pendidikan. Upaya yang dilakukan adalah dengan memperkecil angka putus sekolah dan meningkatkan jumlah angka yang melanjutkan antarjenjang pendidikan. Cara yang paling efektif yaitu dengan menaikkan waktu Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan waktu Rata-Rata Harapan Lama Sekolah (HLS) yang menjadi indikator penting untuk menentukan IPM di sector pendidikan. Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator RLS ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Standar UNDP (Badan Program Pembangunan PBB) adalah minimal 0

tahun dan maksimal 15 tahun. HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Data waktu Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan waktu Rata-Rata Harapan Lama Sekolah (HLS) di Indonesia tahun 2010 – 2016 dapat dilihat pada tabel 1 :

Tabel 1. Rata-rata lama sekolah dan rata-rata harapan lama sekolah di Indonesia tahun 2010 - 2016

NO	TAHUN	WAKTU RATA-RATA LAMA SEKOLAH (TAHUN)	WAKTU RATA-RATA HARAPAN LAMA SEKOLAH (TAHUN)
1	2010	7,46	11,29
2	2011	7,52	11,44
3	2012	7,59	11,68
4	2013	7,61	12,10
5	2014	7,73	12,39
6	2015	7,84	12,55
7	2016	7,95	12,72

Sumber : Publikasi Indeks Pembangunan Manusia Badan Pusat Statistik (2016)

Data diatas menunjukkan waktu rata-rata lama sekolah dan waktu rata-rata harapan lama sekolah di Indonesia (tahun) tahun 2010 – 2016. Pada tahun 2016 waktu rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia adalah sebesar 7,95, ini berarti bahwa penduduk Indonesia yang berumur 15 tahun ke atas sebagian besar hanya menamatkan pendidikan sekolah dasar (6 tahun). Adapun angka harapan lama sekolah penduduk Indonesia sebesar 12,7 tahun (tamat sekolah menengah atas). Ini menunjukkan masih sangat rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia.

Tolok ukur yang lain untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah dengan melakukan akreditasi sekolah. Sebuah sekolah akan bermutu jika terdapat pengakuan dan penilaian dari beberapa pihak yang berwenang. Pemerintah melakukan akreditasi untuk menilai kelayakan program atau satuan pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional secara bertahap, terencana dan terukur sesuai Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB XVI Bagian Kedua Pasal 60 tentang Akreditasi. Berikut adalah data sekolah di Indonesia berdasarkan peringkat akreditasi :

Tabel 2. Peringkat Akreditasi Sekolah di Indonesia

NO	JENJANG	AKREDITASI A	AKREDITASI B	AKREDITASI C	BELUM TERAKREDITASI	TOTAL
1	SD	11.504	32.660	8.081	95.528	147.773
2	SLB	112	201	38	1.042	1.393
3	SMP	5.729	6.714	2.656	22.048	37.147
4	SMA	2.871	2.679	871	6.353	12.774
5	SMK	1.627	2.371	691	8.079	12.768
	TOTAL	21.843	44.625	12.337	133.050	211.855

Sumber : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan data dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia diatas, dari 211.855 jumlah sekolah dasar dan menengah yang terdaftar, hanya 21.843 sekolah yang terakreditasi A atau hanya sekitar 10%. Bahkan 63% sekolah dasar dan menengah belum terakreditasi. Sungguh miris, karena akreditasi adalah acuan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan rencana pengembangan sekolah, bahan masukan untuk

pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga sekolah dan pendorong motivasi peningkatan kualitas sekolah secara gradual.

Berdasarkan riset Programme for International Student Assesment (PISA), Pendidikan dasar dan menengah di Indonesia belum mampu menyiapkan murid dengan kemampuan berpikir kritis dan analitis sebagaimana seorang ilmuwan perlukan serta belum mampu menginspirasi murid untuk bercita-cita menjadi peneliti dalam bidang apapun. Padahal, tanpa murid yang kemampuannya bagus, tidak akan bisa memperluas dan memperkuat program riset mereka dan meningkatkan posisi mereka di dunia internasional. Akibatnya, akan semakin sulit berkompetisi secara internasional dalam penciptaan pengetahuan sehingga akan lebih sulit bagi Indonesia untuk bertransisi ke sistem ekonomi berbasis pengetahuan. Sedikitnya peneliti dan ilmuwan yang ada, juga berarti lebih sedikit pengetahuan dan penelitian tersedia untuk membantu pengambil kebijakan membuat keputusan.

Pada kenyataannya pendidikan belum sepenuhnya memberikan pencerahan kepada masyarakat melalui nilai dan manfaat pendidikan itu sendiri. Rendahnya kualitas lulusan merupakan salah satu bukti bahwa pendidikan di Indonesia belum secara optimal dikembangkan. Relevansi pendidikan dalam hal substansi dengan kebutuhan masyarakat dinilai masih rendah. Dunia industry mengeluhkan masih kurang relevannya kompetensi lulusan pendidikan tinggi dengan dunia kerja, tenaga kerja tidak relevan dengan industry. Menurut data dari Kemenristekdikti, Indonesia saat ini memiliki 4.529 perguruan tinggi, namun hanya 5,4 persen yang berbentuk perguruan tinggi vokasi/politeknik. Dari angka 5,2 persen tersebut, hanya ada satu yang memiliki akreditasi A, mayoritas hanya memiliki akreditasi B atau C. Bahkan, masih ada politeknik yang tidak punya akreditasi sama sekali. Jumlah pendidikan vokasi ini masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan kebutuhan industri. Padahal untuk memiliki pertumbuhan ekonomi dan industri yang baik makasuatunya negara harus memiliki paling tidak 50 persen dari seluruh perguruan tingginya adalah perguruan tinggi vokasi.

Semakin tertinggalnya pendidikan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain, harusnya membuat kita lebih termotivasi untuk berbenah diri. Tetapi parahnya, pendidikan justru menjadi kawasan politisasi dari para pejabat. Banyaknya masalah pendidikan yang muncul ke permukaan merupakan gambaran praktek pendidikan kita. Islam sangat mementingkan pendidikan. Dengan pendidikan yang benar dan berkualitas, individu-individu yang beradab akan terbentuk yang akhirnya memunculkan kehidupan sosial yang bermoral. Seperti Hadist Nabi berikut :

من أراد الدنيا ياف علمه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعدله بالعلم، ومن أراد الدنيا والآخرة فعدله بالعلم

Artinya :”**Barang siapa yang menginginkan dunia, hendaklah ia berilmu, Barang siapa yang menginginkan akhirat hendaklah ia berilmu, Barang siapa yang menginginkan kedua-duanya sekaligus, ia pun harus berilmu.**”

Untuk memperoleh kesuksesan atau kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat bahkan kedua-duanya harus mempergunakan alat, alat untuk mencapai kesuksesan itu adalah ilmu. Ilmu ibarat cahaya yang mampu menerangi jalan seseorang untuk mewujudkan segala cita-citanya, sementara kebodohan akan membawa seseorang kepada kemudlaratan atau kesengsaraan yang membelenggu hidupnya. Ini menunjukkan betapa pentingnya pendidikan menurut Islam.

Islam merupakan sebuah sistem yang memberikan solusi terhadap berbagai problem yang dihadapi manusia. Setiap solusi yang disajikan Islam secara pasti selaras dengan fitrah manusia. Dalam konteks pendidikan, Islam telah menentukan bahwa negaralah yang berkewajiban untuk mengatur segala aspek yang berkenaan dengan sistem pendidikan yang diterapkan dan mengupayakan agar pendidikan dapat diperoleh rakyat secara mudah. Rasulullah SAW. Bersabda: “**Imam (Khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya.**” (HR Al-Bukhari dan Muslim). Terkait dengan peran negara dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan masyarakatnya, maka negara wajib

menjamin pendidikan yang bermutu bagi seluruh warga negara dengan fasilitas sebaik mungkin. Karena pendidikan dalam Islam merupakan kebutuhan dasar sebagaimana kebutuhan terhadap makan, minum, pakaian, rumah, kesehatan, dan sebagainya.

Perhatian Rasulullah SAW. terhadap dunia pendidikan tampak ketika beliau menetapkan para tawanan Perang Badar dapat bebas jika mereka mengajarkan baca-tulis kepada sepuluh orang anak kaum muslimin Madinah. Hal ini merupakan tebusan. Dalam pandangan Islam, barang tebusan itu merupakan hak Baitul Mal (Kas Negara). Tebusan ini sama nilainya dengan pembebasan tawanan Perang Badar. Artinya, Rasulullah SAW telah menjadikan biaya pendidikan itu setara nilainya dengan barang tebusan yang seharusnya milik Baitul Mal. Dengan kata lain, beliau memberikan upah kepada para pengajar (yang tawanan perang itu) dengan harta benda yang seharusnya menjadi milik Baitul Mal. Kebijakan beliau ini dapat dimaknai, bahwa kepala negara bertanggung jawab penuh atas setiap kebutuhan rakyatnya, termasuk pendidikan.

Islam menghendaki agar manusia dididik supaya ia mampu merealisasikan tujuan hidupnya sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah SWT. Tujuan hidup manusia itu menurut Allah ialah beribadah kepada Allah. Seperti dalam surat Adz Dzariyat ayat 56 :

“Dan Aku menciptakan Jin dan Manusia kecuali supaya mereka beribadah kepada-Ku”.

Tujuan utama dari pendidikan Islam ialah mencapai ridla Allah. Dengan pendidikan diharapkan akan lahir individu-individu yang baik, bermoral, berkualitas sehingga bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, masyarakatnya, bangsanya serta umat manusia pada umumnya. Manusia adalah fokus utama dari pendidikan. Ia terdiri dari jasmani dan rohani. Karenanya institusi pendidikan seharusnya lebih memfokuskan perhatiannya kepada substansi kemanusiaan, membuat system yang mendukung kepada terbentuknya manusia yang baik. Pendidikan diharapkan mampu mengantarkan anak didik untuk memiliki kemakmuran materi dan juga individu yang memiliki kebahagiaan dunia dan akherat.

Tujuan pendidikan identik dengan gambaran manusia terbaik menurut orang-orang tertentu. Kualitas hidup seseorang ditentukan oleh pandangan hidupnya. Bila pandangan hidupnya berupa agama, maka manusia yang baik yang menjadi tujuan pendidikan adalah manusia yang baik menurut agamanya,

Dalam Alquran Allah Berfiman dalam Surat Al_Baqarah ayat 1-5

Artinya :

1. Alif laam miin
2. Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa
3. (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka.
4. dan mereka yang beriman kepada kitab (Al Quran) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-Kitab yang telah diturunkan sebelumnya, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat.
5. mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung.

Dari hal diatas dapat dipahami bahwa surah Al-Baqarah ayat 1-5 ini sangat dalam pesan moralnya, dimana kalaulah dikaitkan dengan tujuan pendidikan itu sendiri dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Menambah ketaqwaan manusia pada Allah
- b) Agar manusia mempercayai akan keberadaan Allah
- c) mewujudkan manusia yang banyak beramal shaleh
- d) Mewujudkan manusia yang percaya akan hari akhir
- e) Mewujudkan kesuksesan dalam hidup.

Adapun faktor –faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia, yaitu :

1. Rendahnya kualitas sarana fisik
Untuk sarana fisik misalnya, banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi kita yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap. Sementara laboratorium tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai dan sebagainya. Bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, tidak memiliki laboratorium dan sebagainya.
2. Rendahnya kualitas guru
Keadaan guru di Indonesia juga amat memprihatinkan. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam pasal 39 UU No 20/2003 yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian masyarakat. Walaupun guru dan pengajar bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pendidikan, tetapi pengajaran merupakan titik sentral pendidikan dan kualifikasi. Sebagai cermin kualitas, tenaga pengajar memberikan andil sangat besar pada kualitas pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. Kualitas guru dan pengajar yang rendah juga dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat kesejahteraan guru.
3. Rendahnya kesejahteraan guru
Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam membuat rendahnya kualitas pendidikan Indonesia. Kesenjangan kesejahteraan guru swasta dan negeri menjadi masalah lain yang muncul. Di lingkungan pendidikan swasta, masalah kesejahteraan masih sulit mencapai taraf ideal.
4. Kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan.
Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas pada tingkat Sekolah. Oleh karena itu diperlukan kebijakan dan strategi pemerataan pendidikan yang tepat untuk mengatasi masalah ketidakmerataan tersebut.
5. Rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan.
Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya lulusan yang menganggur. Menurut data Balitbang Depdiknas 1999, setiap tahunnya sekitar 3 juta anak putus sekolah dan tidak memiliki keterampilan hidup sehingga menimbulkan masalah ketenagakerjaan tersendiri. Adanya ketidakserasian antara hasil pendidikan dan kebutuhan dunia kerja ini disebabkan kurikulum yang materinya kurang fungsional terhadap keterampilan yang dibutuhkan ketika peserta didik memasuki dunia kerja.
6. Mahalnya biaya pendidikan.
Pendidikan bermutu itu mahal. Kalimat ini sering muncul untuk menjustifikasi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT) membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. Orang miskin tidak boleh sekolah. Pendidikan berkualitas memang tidak mungkin murah, atau tepatnya, tidak harus murah atau gratis. Tetapi persoalannya siapa yang seharusnya membayarnya? Pemerintahlah sebenarnya yang berkewajiban untuk menjamin setiap warganya memperoleh pendidikan dan menjamin akses masyarakat bawah untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Akan tetapi, kenyataannya Pemerintah justru ingin berkilah dari tanggung jawab. Padahal keterbatasan dana tidak dapat dijadikan alasan bagi Pemerintah untuk 'cuci tangan'.

Oleh karena itu pembangunan pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Pembangunan pendidikan nasional yang akan dilakukan secara jelas menekankan pentingnya pendidikan sebagai salah satu cara untuk penanggulangan

kemiskinan, peningkatan keadilan, dan kesetaraan gender, pemahaman nilai-nilai budaya dan multikulturalisme serta peningkatan keadilan social.

Terhambatnya peningkatan pendidikan Indonesia di sebabkan tidak terfokusnya arah peningkatan pendidikan itu sendiri. Antisipasi menghadapi ancaman semakin minimnya pendidikan yang didapatkan oleh peserta didik itu harus melibatkan pemegang kebijakan politik tertinggi, paling tidak pimpinan nasional. Bukankah itu akan menjadi bagian dari wawasan yang dimiliki para pemimpin dalam menjalankan proses kepemimpinan. Oleh karena itu, komitmen ditingkat pemimpin sangat dibutuhkan. Komitmen tersebut juga membutuhkan perubahan system politik secara menyeluruh. Perubahan ini kelak diharapkan menjadi bahan pemikiran bagi lembaga legislatif. Karena itu pula, persoalan ketatanegaraan yang sekarang ada di depan mata juga sangat membutuhkan penyelesaian secara sistematis.

Selama ini kebijakan politik pemerintah masa kini cenderung menghasilkan perpecahan bangsa. Akibat kebijakan yang sewenang-wenang itu kini kita semua yang merasakannya. Pembangunan fisik yang menunjang anak didik memang terjadi, baik di perkotaan maupun pedesaan, hanya saja suatu bangsa tidak akan menjadi besar jika sekedar mengandalkan pembangunan fisik, bangsa ini harus juga membangun pendidikan secara arif dan bijaksana.

Sejarah peradaban bangsa menunjukkan bahwa negara-negara yang bersedia menempatkan prioritas penting sektor pendidikan dalam proses pembangunan bangsanya, maka negara tersebut berada dalam keadaan yang makmur dan menguasai berbagai macam ragam ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu Negara Amerika Serikat, Eropa Barat, Kanada, dan Jepang. Negara-negara ini pada awalnya pembangunan bangsanya menempatkan pendidikan pada tingkat prioritas yang tinggi, hal itu dilakukan karena mereka yakin bahwa hanya dengan melalui proses dan pembangunan sektor pendidikan secara berkesinambungan, peningkatan kualitas pendidikan dilakukan secara signifikan.

Dalam era otonomi sebenarnya terbuka peluang besar untuk membangun dunia pendidikan di daerah menjadi lebih berkualitas. Hal ini terjadi karena Bupati/Walikota memiliki kewenangan yang penuh dalam menentukan kualitas pendidikan sesuai dengan konteks daerahnya. Jadi dalam era otonomi daerah kualitas pendidikan untuk yang akan datang lebih banyak tergantung pada komitmen daerahnya untuk merumuskan visi dan misi daerahnya masing-masing. Jika daerah cukup visioner, pengembangan sector pendidikan dapat memiliki peluang besar untuk dapat memenuhi standar kualitas sesuai dengan harapan para stakeholder. Manakala pemerintah daerah memiliki political wil yang kuat dan kemudian disertai dengan kebijakan dan sistem perencanaan yang mengedepankan arti penting pendidikan sebagai *human investment* di daerah, dapat dipastikan pendidikan di daerah itu dapat memiliki praksis yang baik dan kualitas pendidikan akan dapat ditegakkan.

Namun sebaliknya manakala pemerintahan daerah memandang pendidikan tidak penting sehingga visi dan misi pendidikan di daerah itu tidak dirumuskan secara jelas dalam system perencanaan yang baik, maka kemungkinan besar tidak dapat diderivasikan menjadi praksis pendidikan yang solid, jika hal ini terjadi praksis pendidikan tidak dapat dilaksanakan secara professional. Akhirnya setiap berbicara visi dan misi pada satuan pendidikan berubah menjadi sesuatu yang dipandang mewah. Kondisi seperti ini akan mendorong para praktisi pendidikan di daerah kehilangan arah dalam menjalankan fungsinya secara professional. Oleh Karena itu di era otonomi pendidikan dewasa ini merupakan saat yang menentukan membangun budaya tatakelola.

Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah ditegaskan bahwa sistem pendidikan nasional yang bersifat sentralistis selama ini kurang mendorong terjadinya demokratisasi dan desentralisasi penyelenggaraan pendidikan. Sebab sistem pendidikan yang sentralistis diakui kurang bisa mengakomodasi keberagaman daerah, keberagaman sekolah, serta keberagaman peserta didik, bahkan cenderung mematikan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Menguatnya aspirasi bagi otonomisasi dan desentralisasi pendidikan tidak terlepas dari kenyataan adanya kelemahan konseptual dan penyelenggaraan pendidikan nasional, yaitu:

(1) kebijakan pendidikan nasional sangat sentralistik dan serba seragam yang gilirannya mengabaikan keseragaman sesuai dengan realita kondisi, ekonomi, budaya masyarakat Indonesia di berbagai daerah, (2) kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional lebih berorientasi pada pencapaian target tertentu, seperti target kurikulum yang pada gilirannya mengabaikan proses pembelajaran yang efektif dan mampu menjangkau seluruh ranah pada potensi peserta didik.

Dengan kehadiran UU Nomor 32 Tahun 2004 (dimulai dengan UU Nomor 29 Tahun 1999) tentang pemerintahan daerah, dimana sejumlah kewenangan telah diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, memungkinkan daerah itu untuk melakukan kreasi inovasi, dan improvisasi dalam upaya pembangunan daerahnya, termasuk dalam bidang pendidikan. Pemberlakuan otonomi daerah tersebut membawa implikasi terhadap perubahan dalam penyelenggaraan pendidikan yang salah satunya adalah berkurangnya peran pemerintah pusat dalam pengelolaan pendidikan.

Disadari bahwa pemberian porsi yang lebih besar kepada daerah untuk melaksanakan pembangunan dibidang pendidikan membawa sejumlah implikasi seperti bidang administrasi, kelembagaan, keuangan, perencanaan dan sebagainya. Oleh karena itu kesiapan daerah untuk dapat menjalankan peran yang lebih besar menjadi sentral dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan. Meskipun desentralisasi pendidikan merupakan sebuah keharusan, namun dalam realitasnya pelaksanaan desentralisasi pendidikan terkesan satu tindakan yang tergesa-gesa dan tidak siap. Hal ini dapat terlihat diberbagai persoalan yakni sumber daya manusia (SDM) daerah, sarana dan prasarana yang kurang memadai, manajemen pendidikan yang belum optimal dan lain sebagainya.

Diantara persoalan yang dihadapi pendidikan di daerah sekarang adalah menyangkut mutu lulusan yang masih rendah, kekurangan guru dan kualifikasinya yang tidak sesuai, ketidak merataan penyelenggaraan pendidikan, masalah relevansi, kurikulum dan hal-hal lain sebagainya, ini merupakan suatu pekerjaan rumah yang cukup berat bagi pemerintah daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah. Pemahaman dan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah tentang pendidikan sangat diperlukan dalam upaya menjawab permasalahan tersebut. Adapun kebijakan nasional yang menjadi prioritas pemerintah harus pula mendapat perhatian dari sekolah. Dengan demikian sekolah dituntut memiliki akuntabilitas baik kepada masyarakat maupun pemerintah, karena keduanya merupakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

B. Dampak Rendahnya Kualitas Pendidikan di Indonesia

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting guna meningkatkan sumberdaya manusia yang ada. Karena melalui pendidikanlah kita mampu untuk meningkatkan kemampuan yang kita miliki. Selain itu, pendidikan juga dapat menciptakan generasi yang unggul dan kompetitif dalam upaya untuk menghadapi tantangan yang akan terjadi dimasa depan. Diperlukan sebuah komitmen dalam membangun kemandirian dan pemberdayaan yang dapat menopang kemajuan pendidikan dimasa depan demi tercapainya idealisme pendidikan.

Tujuan dari pendidikan nasional seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 bab II pasal 3 tentang sistem pendidikan nasional dijelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Namun tujuan pendidikan diatas yang mempunyai arti sangat penting bagi kelangsungan pendidikan di Indonesia belum tercapai secara optimal atau sepenuhnya, sehingga kualitas pendidikan di Indonesia saat ini dalam kategori rendah. Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia dapat menimbulkan dampak yang mempengaruhi berbagai sisi kehidupan di Indonesia:

1. Rendahnya taraf hidup masyarakat.

Pendidikan diyakini sangat berpengaruh terhadap kecakapan, tingkah laku dan sikap seseorang, dan hal ini semestinya terkait dengan tingkat pendapatan seseorang. Artinya secara rata-rata makin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka makin memungkinkan orang tersebut memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah tingkat pendidikan, maka akan semakin rendah tingkat pendapatan yang akan diperoleh, yang berdampak pada rendahnya taraf hidup.

2. Meningkatkan tingkat kriminalitas

Definisi Pendidikan Menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No. 20 tahun 2003 Bab I, pasal 1 menggariskan pengertian: "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara". Pendidikan merupakan sebuah sistem. Salah satu masukan dalam sistem pendidikan ini adalah lingkungan. Lingkungan yang baik akan menciptakan manusia-manusia yang memiliki budi pekerti luhur, sedangkan lingkungan yang buruk hanya akan menciptakan manusia-manusia yang berbudi pekerti buruk pula, seperti sebuah pepatah, "*kebo gupak neler-neler*" (orang jahat akan mempengaruhi orang lain yang didekatnya untuk berbuat jahat). Selain itu ada pula pepatah yang mengatakan, "*wong kang alim kumpulono*" (berkumpulullah dengan orang-orang yang berilmu). Kedua pepatah ini membuktikan bahwa lingkungan memang sangat mendukung demi terciptanya manusia yang mampu mengembangkan kemampuannya. Tingkat pendidikan yang rendah akan berpengaruh kepada lemahnya mental seseorang, mudah terhasut oleh hal-hal yang negative, tidak bisa berpikir secara rasional sehingga akan meningkatkan angka kriminalitas.

3. Rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Dampak yang sangat signifikan dari rendahnya mutu pendidikan adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Kita sangat prihatin karena peringkat sumber daya manusia bangsa Indonesia termasuk rendah di antara Negara-negara ASEAN. Indonesia saat ini berada diperingkat 105 dari 173 negara yang disusun oleh UNDP. Brunei Darussalam berada di peringkat 25, Malaysia berada di peringkat 37, Thailand berada di peringkat 67, Filipina berada di peringkat 77. Rendahnya SDM di Negara kita, di karenakan rendahnya mutu pendidikan. Pendidikan mempunyai peranan penting, karena pendidikan mampu meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab. Sehingga sumber daya alam di tanah air akan terolah dengan baik.

4. Pengelolaan sumber daya alam tidak maksimal.

Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya alamnya. Berbagai sumber kekayaan alam, flora, fauna, bahan tambang, minyak dan gas bumi akan memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pembangunan nasional. Tetapi untuk mengolah dan mengeksplorasi sumber daya alam tersebut dibutuhkan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian, kecakapan dan berkompeten. Saat ini, Indonesia belum sepenuhnya bisa mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam tersebut, dikarenakan kualitas sumber daya manusia yang belum mumpuni dan kompeten sebagai akibat masih rendahnya tingkat pendidikan. Negara kita masih banyak merekrut tenaga asing, akibatnya sumber daya alam yang melimpah yang seharusnya bisa untuk mensejahterakan rakyat, harus mengalir ke negara lain.

5. Kemerossotan budaya

Dampak lain dari rendahnya tingkat pendidikan adalah kurangnya kemampuan didalam menganalisa sesuatu yang terjadi dan mudah terpengaruh oleh hal-

hal atau sesuatu yang baru dan emosi yang tidak stabil. Di era media sosial sekarang ini, banyak budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia dan Islam yang dengan sangat mudah di akses oleh semua golongan. Rendahnya tingkat pendidikan, akan mengakibatkan budaya asing tersebut mudah diserap oleh masyarakat mengalahkan budaya sendiri.

6. Dampak pada runtuhnya kedaulatan negara

Kemandirian ekonomi adalah sebuah isu yang sangat sentral dalam hubungan dengan kedaulatan negara. Sejak jaman orde baru, pemerintah mulai membuka investasi asing seluas-luasnya. Tujuannya untuk mempercepat proses pembangunan. Walhasil banyak sumber alam dan aset negara diserahkan ke asing. Sejak tahun 1969 sampai saat ini tercatat 80 persen sumber daya alam dan asset Indonesia telah dikuasai asing. Sekitar 70 persen sumber daya alam dan aset penting itu dikuasai oleh Amerika Serikat.

Penjualan aset dan penguasaan sumber daya alam yang penting itu terus berlangsung. Tahun 2002, misalnya, PT Indosat dijual ke Singapura Technologies dan Telemedia (STT) seharga 5,62 triliun. Kemudian 6 Juni 2008 Indosat dijual oleh STT ke Qatar Telecommunication (Qtel) seharga US\$ 1,8 miliar atau Rp 16,740 triliun dengan kurs 9.300\US\$. Itu artinya Singapura meraup untung 11,678 triliun. Lalu siapa yang dirugikan? Jelas Indonesia. Berapa triliun yang harus dikeluarkan kalau negara ini mau membeli lagi.

Alasan tim ekonomi pemerintah dan para pendukung divestasi Indosat saat itu adalah untuk menciptakan fair competition di bidang telekomunikasi. Agar terbina perkembangan bisnis telekomunikasi yang terlepas dari jerat monopoli negara dan pemerintah demi terwujudnya pasar yang efektif dan efisien. Apakah benar demi fair competition. Sejauh yang diketahui publik, STT bersama Singapore Telecommunication (SingTel) adalah anak perusahaan yang bernaung di bawah perusahaan milik pemerintah Singapura yakni Temasek Holding (Pte) Ltd. Lalu, dengan penetapan STT sebagai pemenang tender divestasi Indosat menjadikan perusahaan tersebut menguasai dan mengontrol bisnis selular Satelindo dan IM3. Kemudian SingTel sebagai anak Temasek yang lain telah menguasai 35 persen saham penyelenggara selular Telkomsel. Dengan demikian, mayoritas industri selular Indonesia ketika itu dikuasai Temasek Holding. Artinya Singapura telah memonopoli bisnis selular di Indonesia.

Dengan demikian alasan fair competition kelihatannya hanya drama saja. Tampaknya ada kepentingan segelintir golongan yang ingin mendapat keuntungan. Tentu saja yang dirugikan lagi-lagi adalah rakyat bangsa ini. Sejak itu di udara kita tak lagi berdaulat. Satelit Palapa dan Indosat otomatis dikuasai asing. Lewat penguasaan udara itu kita praktis sudah dijajah karena hampir semua pembicaraan telepon, faks, pengiriman data, gambar harus melalui satelit yang sudah dikuasai asing. Dari sisi keamanan negara tentu saja bangsa ini tak lagi memiliki kemampuan pengamanan teritorial di bidang telekomunikasi. Ini tentu saja mempengaruhi kinerja pengamanan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Jauh sebelum itu keterlibatan asing di republik ini sudah sampai di ujung timur negeri ini. Adalah Pegunungan Grasberg di Papua yang menjadi sasaran keserakahan multinasional corporation. Di sana tanah dan airnya tak lagi bisa dinikmati anak bangsa. Perusahaan pertambangan emas, perak, dan tembaga milik Freeport McMoran asal Amerika sudah bercokol hampir 32 tahun. Mengeruk sedalam-dalamnya hasil bumi yang bisa dikeruk yang kemudian meninggalkan ratusan kawah dan tanah tandus.

Menurut company profile-nya, pada tahun 2002 Freeport telah mencapai rekor volume penjualan tembaga sebesar 1,5 juta poud net; 2,3 juta ons emas, dan mengapalkan rata-rata 2,8 juta metrik ton per tahun. Tapi, company profile tersebut tidak

menjelaskan hasil tambang lain, seperti uranium, yang juga terkandung di dalam tanah masyarakat Papua itu.

Selain itu, tanah Minahasa juga sudah dikuasai PT Newmont. Penggalan hasil tambang emas di Buyat itu hanya meninggalkan berbagai penyakit pada penduduk kampung. Bahkan, Newmont juga sudah mulai mengelola tanah-tanah pertambangan di Sumatera Utara lewat anak perusahaannya, PT Newmont Pacific Nusantara. Newmont juga ada di Desa Tatebal, Kawasan Bukit Elang Nusa Tenggara Barat. Namun, apa manfaatnya keberadaan berbagai perusahaan tambang tersebut bagi rakyat bangsa ini. Sudah hampir 40 tahun umur industri pertambangan mineral di negeri ini, mereka telah gagal membuktikan mitos-nya menjadi penopang perekonomian Indonesia. Apalagi mensejahterakan rakyat berdaulat bangsa ini.

Kontribusi sektor ini hanya 1,3 - 2,3 triliun terhadap APBN dalam 4 tahun terakhir. Lebih kecil dari sektor kehutanan. Nilai tambahnya juga rendah karena bahan tambang diekspor dalam bentuk bahan mentah, ditambah rendahnya penyerapan tenaga kerja massal di tingkat lokal. Sektor ini juga gagal menunjukkan tanggung jawabnya terhadap kerusakan lingkungan, pelanggaran HAM, dan penyelesaian konflik dengan penduduk lokal di lokasi-lokasi pertambangan. Kekuasaan korporasi telah melampaui kemampuan negara mengontrol mereka. Pengambilalihan kekayaan sumber daya alam milik rakyat bangsa ini oleh pihak asing seharusnya tidak perlu terjadi, andai saja rakyat sudah mempunyai kompetensi maksimal untuk mengelola sumber daya alam yang berlimpah yang seharusnya dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sayangnya, saat ini pengelolaan sumber ekonomi hanya 33 % yang dikelola oleh negara ini, sebagian besar sudah dikuasai asing, yang akibatnya banyak kebijakan strategis dikuasai asing, yang berimbas pada runtuhnya kedaulatan bangsa ini.

C. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pendidikan

Diantara sekian banyak agenda pembangunan bangsa, pendidikan merupakan salah satu agenda penting dan strategis yang menuntut perhatian sungguh-sungguh dari semua pihak. Sebab pendidikan adalah faktor penentu kemajuan bangsa di masa depan. Jika kita sebagai bangsa berhasil membangun dasar-dasar pendidikan nasional dengan baik, maka diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan di bidang-bidang yang lain. Karena pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi modal manusia yang akan menentukan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa.

Dalam hal ini kebijakan pendidikan yang ada belum mampu meningkatkan mutu pendidikan menembus pencapaian jangka pendek (output pendidikan) dan pencapaian jangka panjang (outcome pendidikan), apalagi mengungguli pencapaian mutu pendidikan negara tetangga. Peningkatan mutu pendidikan selama ini masih belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Rendahnya mutu pendidikan ini disebabkan oleh banyak hal, antara lain mutu dan distribusi guru yang masih belum memadai, kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, kurikulum yang kurang sesuai, lingkungan belajar di sekolah maupun dalam keluarga dan masyarakat belum mendukung.

Sasaran pembangunan pendidikan adalah meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan. Sasaran tersebut ditandai oleh :

1. Meningkatnya taraf pendidikan penduduk Indonesia, melalui:
 - a. Meningkatnya secara nyata persentase penduduk yang dapat menyelesaikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
 - b. Meningkatnya secara signifikan partisipasi penduduk yang mengikuti pendidikan menengah.
 - c. Meningkatnya secara signifikan partisipasi penduduk yang mengikuti pendidikan tinggi yang antara lain diukur dengan meningkatnya APK jenjang pendidikan tinggi.
 - d. Meningkatnya proporsi anak yang terlayani pada pendidikan anak usia dini;
 - e. Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun keatas.

- f. Meningkatnya akses orang dewasa untuk mendapatkan pendidikan kecakapan hidup;
- g. Meningkatnya keadilan dan kesetaraan pendidikan antarkelompok masyarakat termasuk antara wilayah maju dan tertinggal, antara perkotaan dan pedesaan, antara daerah maju dan daerah tertinggal, antara penduduk kaya dan penduduk miskin, serta antara penduduk laki-laki dan perempuan.
2. Meningkatnya kualitas pendidikan yang ditandai dengan :
 - a. Tersedianya standar pendidikan nasional serta standar pelayanan minimal untuk tingkat kabupaten/kota;
 - b. Meningkatnya proporsi pendidik pada jalur pendidikan formal maupun non formal yang memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar;
 - c. Meningkatnya proporsi satuan pendidikan baik negeri maupun swasta yang terakreditasi baik;
 - d. Meningkatkan persentase siswa yang lulus ujian akhir pada setiap jenjang pendidikan;
 - e. Meningkatnya minat baca penduduk Indonesia.
3. Meningkatnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan yang ditandai dengan :
 - a. Meningkatnya efektivitas pendidikan kecakapan hidup pada semua jalur dan jenjang pendidikan;
 - b. Meningkatnya hasil penelitian, pengembangan dan penciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh perguruan tinggi serta penyebarluasan dan penerapannya pada masyarakat.
4. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pelayanan pendidikan yang antara lain diukur dengan:
 - a. Efektifnya pelaksanaan manajemen berbasis sekolah;
 - b. Meningkatnya anggaran pendidikan baik yang bersumber dari APBN maupun APBD sebagai prioritas nasional yang tinggi didukung oleh terwujudnya sistem pembiayaan yang adil, efisien, efektif, transparan dan akuntabel;
 - c. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan;
 - d. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan otonomi dan desentralisasi pendidikan termasuk otonomi keilmuan.

Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut , peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Langkah pertama adalah meningkatkan akses terhadap masyarakat untuk bisa menikmati pendidikan di Indonesia yang diukur berdasarkan angka partisipasi.
2. Langkah kedua adalah menghilangkan ketidak merataan dalam akses pendidikan, seperti ketidakmerataan yang terjadi di desa dan antar gender.
3. Langkah ketiga adalah meningkatkan kualifikasi guru dan dosen, serta meningkatkan nilai rata-rata kelulusan dalam ujian nasional.
4. Langkah keempat adalah pemerintah menambah jenis pendidikan di bidang kompetensi atau profesi sekolah kejuruan demi terciptanya tenaga siap pakai yang dibutuhkan.
5. Langkah kelima adalah pemerintah membangun infrastruktur seperti menambah jumlah komputer dan perpustakaan di sekolah-sekolah.
6. Langkah keenam adalah pemerintah meningkatkan anggaran pendidikan.
7. Langkah ketujuh adalah peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam aplikasi pendidikan.
8. Langkah kedelapan adalah pembiayaan bagi masyarakat miskin agar dapat menikmati fasilitas pendidikan yang ada.

Selain upaya dari pemerintah dalam mengatasi rendahnya kualitas pendidikan, ada 2 solusi dalam mengatasi masalah pendidikan di Indonesia yaitu :

Pertama, solusi sistemik yaitu solusi dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Contohnya untuk mengatasi rendahnya sarana fisik, kesejahteraan guru dan mahal biaya pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa sistem pendidikan berkaitan dengan sistem ekonomi yang diterapkan. Sistem pendidikan Indonesia saat ini, menerapkan sistem ekonomi kapitalisme (mazhab neoliberalisme), yang mempunyai prinsip meminimalkan peran dan tanggungjawab negara dalam urusan publik, termasuk pendanaan pendidikan

Kedua, solusi teknis yaitu solusi yang menyangkut hal-hal teknis yang berkaitan langsung dengan pendidikan. Contohnya untuk menyelesaikan masalah kualitas guru dan prestasi siswa. Masalah teknis dikembalikan kepada upaya-upaya praktis yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Solusi dalam mengatasi rendahnya kualitas guru dapat dilakukan dengan cara peningkatan kesejahteraan, dan pemberian pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. Sedangkan solusi dalam mengatasi prestasi siswa dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kuantitas dan kualitas materi pelajaran, meningkatkan alat-alat peraga dan sarana-sarana pendidikan.

Pelaksanaan sistem pendidikan juga memerlukan kebijakan untuk perubahan atau peningkatan mutu. Diperlukan kebijakan yang langsung bersentuhan dengan keperluan peningkatan mutu sekolah karena di dalamnya berkenaan dengan proses pembudayaan, dengan begitu eksistensi sekolah sangat strategis dalam kerangka kelangsungan hidup kebudayaan manusia. Sekolah menjadi pranata social yang berperan dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang diperlukan untuk menjadi pelaku dalam proses pembangunan bangsa. Untuk itu peranan pendidikan harus ditingkatkan sejalan dengan semakin besarnya tantangan yang dihadapi oleh setiap sekolah dalam era globalisasi abad ke -21. bahkan dalam era otonomi saat ini seperti: tantangan dalam bidang manajemen berbasis sekolah (MBS), kurikulum berbasis kompetensi, pendidikan berbasis masyarakat, sertifikasi guru untuk memperdayakan tenaga kependidikan, dan teknologi pembelajaran yang up to date memerlukan kebijakan pendidikan yang akurat dalam era desentralisasi saat ini, dan kebijakan pendidikan yang harus berkelanjutan.

Dengan demikian melihat plus minusnya bagaimanapun desentralisasi pendidikan merupakan suatu keharusan. Disamping tentunya sejumlah peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan menuntut untuk dilaksanakan. Dengan sejumlah kewenangan yang begitu besar tersebut membawa perubahan struktur dalam pengelolaan pendidikan dan berlaku juga dalam penentuan stakeholder didalamnya, jika pada masa sebelum diberlakukan otonomi daerah stakeholder pendidikan sepenuhnya berada ditangan aparat pusat, maka di era otonomi pendidikan sekarang ini peranan sebagai stakeholder akan tersebar kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Sejalan dengan arah kebijakan otonomi dan desentralisasi yang ditempuh oleh pemerintah, tanggung jawab pemerintah daerah akan meningkat dan semakin luas, termasuk dalam manajemen pendidikan. Pemerintahan daerah diharapkan untuk senantiasa meningkatkan kemampuannya dalam berbagai tahap pembangunan pendidikan, sejak tahap perumusan kebijakan daerah, perencanaan, pelaksanaan, sampai pemantauan atau monitoring di daerah masing-masing yang sejalan dengan kebijakan pendidikan nasional yang digariskan pemerintah.

Konsep penyelenggaraan pendidikan yang bersifat desentralisasi dikenal dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) (*school based management*) yang merupakan perubahan paradigma pengelolaan pendidikan yang awalnya bersifat sentralistik menuju desentralistik. Artinya pengelolaan pendidikan yang semula berpusat pada pemerintah pusat mulai dari yang bersifat mikro maupun makro beralih kepengelolaan pendidikan pada pola manajemen sekolah di mana sekolah tersebut yang mengelolanya. Desentralisasi bidang pendidikan ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 20 Tahun 2003 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional. Dalam pasal 4 ayat (6) disebutkan

pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Selain itu undang-undang memberikan kapasitas kepada publik untuk ikut berpartisipasi dan mengelola pendidikan serta peluang untuk menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat

Desentralisasi pendidikan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Tentu saja desentralisasi pendidikan bukan berkonotasi negatif yaitu untuk mengurangi wewenang atau intervensi pusat melainkan lebih berwawasan keunggulan. Kebijakan umum yang ditetapkan oleh pusat sering tidak efektif karena kurang mempertimbangkan keagamaan dan kekhasan daerah, disamping itu membawa ketergantungan sistem pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan (local), menghambat kreativitas, dan menciptakan budaya menunggu petunjuk dari atas / pusat.

Dengan demikian desentralisasi pendidikan bertujuan untuk memberdayakan peranan unit bawah atau masyarakat dalam menangani persoalan pendidikan di lapangan. Desentralisasi pendidikan yang memfokuskan pada pemberian kewenangan yang lebih besar pada tingkat sekolah dilakukan dengan motivasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Desentralisasi pendidikan meliputi suatu proses pemberian kewenangan yang lebih luas di bidang kebijakan pendidikan dan aspek pendanaannya dari pemerintah pusat ke pemerintah lokal dan pada saat kewenangan yang lebih besar juga diberikan pada tingkat sekolah.

D. Implikasi Kebijakan Pendidikan

Implikasi otonomi daerah bagi desentralisasi pendidikan sangat tergantung pada pembagian kewenangan di bidang pendidikan yang ditangani oleh pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Jika mengacu pada Undang-undang No 22 tahun 1999 maka kewenangan di sektor pendidikan yang terkait dengan perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan sektoral dan nasional secara makro, kebijakan pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, serta kebijakan standarisasi nasional akan ditangani oleh pusat, sedangkan yang lainnya akan ditangani oleh daerah.

Masih belum jelas benar interpretasi pelaksanaan desentralisasi dibidang pendidikan dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 2 tahun 1999. salah satunya tentang status kepegawaian, guru, yakni tetap sebagai PNS nasional atau PNS daerah akan sangat berpengaruh pada alokasi anggaran, yaitu pembiayaan melalui APBN atau APBD. Implikasi lain dari status guru adalah fleksibilitas daerah dan sekolah dalam proses rekrutmen, pengangkatan, penempatan, mutasi, pemberhentian serta evaluasi atas kinerja guru

Dari aspek kurikulum, perlu kejelasan tentang kebijakan perumusan kurikulum, apakah hanya kurikulum inti yang akan ditetapkan oleh pemerintah pusat, sementara muatan local yang dalam persentase cukup signifikan diserahkan kepada masing-masing daerah atau bahkan langsung masing-masing ke sekolah. Saat ini kurikulum sepenuhnya ditentukan oleh pusat misalnya (kurikulum 2004) dan daerah hanya dapat merancang bagian kurikulum yang berupa muatan local.

Pertanyaannya apakah arah desentralisasi pendidikan adalah sampai seberapa jauh sekolah- sekolah dapat diberi kewenangan yang lebih besar menentukan kebijakan-kebijakan tentang organisasi dan proses belajar mengajar, manajemen guru, struktur dan perencanaan di tingkat sekolah serta sumber-sumber pendanaan sekolah. Desentralisasi pendidikan yang efektif tidak hanya melibatkan proses pemberian kewenangan dan pendanaan yang lebih besar dari pusat ke daerah, tetapi juga meliputi pemberian kewenangan yang lebih besar ke sekolah-sekolah, sehingga mereka dapat merencanakan proses belajar mengajar dan pengembangan sekolah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing sekolah. Oleh sebab itu, dalam rangka menyambut otonomi daerah yang sekaligus di sebut otonomi penyelenggaraan pendidikan, ada sasaran utama program restrukturisasi sistem dan manajemen pendidikan di Indonesia dalam penyelenggaraan pendidikan mencakup hal-hal sebagai berikut:

Pertama, struktur organisasi pendidikan hendaknya terbuka dan dinamis, serta merencanakan desentralisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, *kedua*, sarana pendidikan dan fasilitas pembelajaran dibakukan berdasarkan

prinsip edukatif sehingga lembaga pendidikan merupakan tempat menyenangkan belajar, berprestasi, berkreasi, berkomunikasi dan berolahraga, serta menjalankan perintah agama, *ketiga*, tenaga kependidikan terutama tenaga pengajar harus direkrut melalui proses seleksi LPTK, *keempat*, struktur kurikulum pendidikan hendaknya mengacu pada penerapan system pembelajaran tidak terikat pada penyelesaian target secara seragam percaturwulan, *kelima*, proses pembelajaran tuntas diterapkan dengan berbagai modus pendekatan pembelajaran, peserta didik aktif sesuai dengan tingkat kesulitan konsep-konsep dasar yang dipelajari, *keenam* system penilaian hasil belajar secara berkelanjutan, *ketujuh*, dilakukan supervisi dan akreditasi, supervise bertujuan untuk pengendali mutu (quality control) dan akreditasi dilakukan untuk menjamin mutu (quality assurance), *kedelapan*, pendidikan berbasis masyarakat.

Implikasi –implikasi tersebut menjadi suatu kewajiban dan akan berimbas pula pada system pendidikan yang ada sehingga pola system manajemen sekolah nanti juga dapat berubah serta membawa peran baru dalam dunia pendidikan. Khususnya sekolah dalam menata diri kedepan. Oleh sebab itu perlu dibangun system manajemen yang secara internal bisa menjadi alternatif pemecahan masalah dalam internalisasi dirinya dengan demikian sekolah dapat dikelola dengan optimal oleh pesonalia yang professional dan pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang lebih dekat serta tahu tentang kebutuhan dan potensi sekolah.

Untuk melaksanakan desentralisasi pendidikan secara nasional tampaknya mengalami banyak kesulitan, karena sejumlah masalah dan kendala yang perlu diatasi. Masalah-masalah yang berkaitan dengan substansi dalam penyelenggaraan pendidikan adalah sebagai berikut:

I. Masalah kurikulum

Dalam konteks otonomi daerah kurikulum suatu lembaga pendidikan tidak sekedar daftar mata pelajaran yang dituntut didalam suatu jenis dan jenjang pendidikan. Dalam pengertian yang luas kurikulum adalah berisi kondisi yang telah melahirkan suatu rencana atau program pembelajaran tertentu, juga berkenaan dengan proses yang terjadi dalam pembelajaran, fasilitas yang tersedia yang menunjang terjadinya proses, dan akhirnya produk atau hasil proses. Oleh sebab itu masyarakat di Indonesia yang sangat heterogen dengan berbagai macam keragamannya seperti: budaya, adat, suku, sumber daya alam dan bahkan sumber daya manusia. Masing-masing daerah mempunyai kesiapan dan kemampuan yang berbeda dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan. Permasalahan relevansi pendidikan selama ini diarahkan pada kurangnya kepercayaan pemerintah pada daerah untuk menata system pendidikannya sesuai dengan kondisi objektif didaerahnya. Situasi ini memacu terciptanya pengangguran lulusan akibat tidak relevannya kurikulum dengan kondisi daerah.

II. Masalah Sumber Daya Manusia (SDM)

Sejak dilaksanakannya otonomi daerah pengelolaan sumber daya manusia didaerah baik dipropinsi, kabupaten/kota memang cukup memprihatinkan. Pimpinan daerah (gubernur, bupati, walikota) yang kekuasaannya sangat besar kadang-kadang menempatkan orang-orangnya secara semena-mena dan jarang memperhatikan aspek profesionalisme, padahal sumber daya manusia merupakan pilar yang paling utama dalam melakukan implementasi desentralisasi pendidikan, ada kekhawatiran dalam bidang kesiapan SDM antaranya belum terpenuhinya lapangan kerja dengan kemampuan sumber daya yang ada semakin jauh pelaksanaannya. Implementasi desentralisasi pendidikan masih menyimpan dalam penempatan SDMnya seperti: pengangkatan pengelolaan pendidikan yang tidak memperhatikan latar belakang dan profesionalisme, kepala dinas pendidikan yang diangkat dari mantan camat, kepala dinas pasar bahkan kepala dinas pemakaman yang terkadang tidak mengerti masalah pendidikan.

Kadang koordinasi lembaga agak terhambat karena tidak ada hubungan secara hirakis antara lembaga yang ada ditingkat kabupaten/kota dengan provinsi. Ketika dinas pendidikan provinsi harus melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota, tetapi pada waktu bersamaan dikabupaten/kota juga dilaksanakan rapat dinas dengan bupati/walikota, maka kepala dinas pendidikan biasanya lebih memilih mengikuti rapat dengan bupati/walikota

yang merupakan atasannya, kutimbang mengikuti rapat koordinasi dengan dinas pendidikan propinsi. Akibatnya hanya utusan yang mewakili kepala dinas kabupaten/kota yang hadir, dalam hal ini terkadang informasi yang diperoleh juga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Fenomena ini sudah lumrah terjadi sejak dilaksanakannya otonomi daerah. Bagaimanapun penempatan sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan profesionalnya dan banyak tenaga kependidikan yang latar belakang pendidikannya tidak relevan di dunia kerja yang ditekuninya merupakan penghambat dalam pelaksanaan system pendidikan.

III. Masalah Dana dan Sarana Prasarana Pendidikan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional sudah mengamanatkan tentang pentingnya alokasi anggaran dana untuk pembiayaan dan pembangunan pendidikan. Dalam pasal 49 ayat (1) dikemukakan bahwa. Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan belanja Negara (APBN) pada sector pendidikan dan minimal 20% dari anggaran pendapatan daerah (APBD).

Sayangnya amanat yang jelas-jelas memiliki dasar dan payung hukum yang jelas dengan berbagai dalil dan alasan sampai saat ini masih belum bisa dilaksanakan. Persoalan anggaran pendidikan sekarang sangat menjadi sorotan dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah sebab meskipun payung hukumnya sudah jelas, tetapi tampaknya khususnya bagi pemerintah daerah masih terlihat ogah-ogahan untuk menganggarkan pendidikan sebesar itu dengan berbagai alasan, kendatipun mereka menyatakan bahwa pendidikan hal yang sangat penting dalam sector penganggaran pendidikan bukan merupakan prioritas yang mesti mendapat perhatian umum.

IV. Masalah Bidang Sosial Budaya

Dalam peningkatan mutu dan relevansi pendidikan pada dasarnya sangat diperlukan orientasi local yang bersifat kedaerahan, dalam hal ini perlu memperhatikan persoalan bidang social budaya karena adanya munculnya kesukuan pada daerah tertentu yang ingin menunjukan sebagai daerah khusus. Dalam dunia pendidikan tindakan untuk membedakan kesukuan cukup membahayakan bagi peserta didik, apabila pengaruhnya terlalu besar dan mereka menginternalisasi nilai-nilai kesukuan yang ditanamkan, hal ini dapat membuat rawan bagi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

V. Masalah Bidang Pembelajaran

Pembelajaran merupakan tugas utama di sekolah yang didalamnya terjadi proses pembelajaran, proses pelatihan, pembimbingan dan penilaian. Guru harus terdorong secara profesional untuk menjalankan tugas tersebut secara integral. Dengan adanya otonomi pendidikan para guru telah diberikan kebebasan untuk mengaktualisasikan bidang pembelajaran tersebut secara optimal sehingga potensi-potensi peserta didik dapat berkembang sebagaimana yang diamanatkan oleh tujuan Sistem Pendidikan Nasional pada umumnya dan tujuan sekolah pada khususnya. Guru harus bersifat proaktif dan kreatif dalam pembelajaran dan tidak hanya menunggu perintah dan petunjuk dari atasan ataupun pemerintah. Guru harus mampu menjemput bola bukan menunggu bola untuk dalam kegiatan proses pengelolaan pendidikan di sekolah dalam upaya mengoptimalkan hasil pembelajaran.

Hak otonomi pendidikan dalam pembelajaran, pembimbingan, pelatihan dan system penilaian yang telah diberikan kepala sekolah dalam kerangka MBS tersebut sayangnya sampai sekarang masih belum bisa berjalan secara optimal. Para guru masih banyak apatis, statis dalam menanggapi pembaharuan atau perubahan pendidikan, mereka masih banyak terbelenggu pada system pembelajaran konvensional yang lebih menekankan pada pemberian informasi serta mengabaikan pada aspek afektif dan psikomotorik. Oleh sebab itu guru masih sulit dikatakan sebagai agen dan pelaku pembaharuan.

VI. Masalah Komite Sekolah dan Dewan pendidikan

Komite sekolah merupakan badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan

pendidikan baik pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah. Sedangkan dewan pendidik dan komite sekolah merupakan badan yang bersifat mandiri. Dalam UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Proenas pada butir 4 disebutkan peningkatan partisipasi keluarga dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Upaya tersebut pemerintah membentuk komite sekolah dan dewan pendidikan, dengan tujuan ikut meningkatkan tanggung jawab dan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Komite sekolah dan dewan pendidik diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 044/U/2002 tanggal April 2002. dengan tujuan yakni sebagai berikut: (1) mewadhi dan menyalurkan aspirasi dalam penyelenggaraan pendidikan, (2) meningkatkan tanggung jawab dan peran aktif dalam penyelenggaraan pendidikan, (3) menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan pendidikan.

Dilain pihak peran yang dijalankan komite sekolah adalah sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam satuan pendidikan, sebagai pendukung yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan, berperan sebagai pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabel, serta sebagai mediator. Tetapi dengan adanya otonomi pendidikan dalam hal ini komite sekolah dan dewan pendidikan hanya merupakan pelengkap administrasi sekolah kejelasan dari masing-masing peran komite tersebut belum dilaksanakan sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat.

Untuk itu dalam menterjemahkan kebijakan pendidikan nasional ke dalam kebijakan sekolah merupakan tugas berat para kepala dinas dan kepala sekolah di era otonomi daerah. Selain itu kebijakan pendidikan yang dikeluarkan dinas pendidikan dan kebudayaan perlu menjadi acuan kepala sekolah yang menginginkan pencapaian keunggulan sekolah. Pengaturan otonomi daerah dalam bidang pendidikan secara tegas dinyatakan dalam PP Nomor 25 tahun 2000 yang mengatur pembagian kewenangan pemerintah pusat dan propinsi. Semua urusan pendidikan diluar kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi tersebut sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah kabupaten/kota. Ini berarti tugas dan beban pemerintah daerah dalam menagani layanan pendidikan amat besar dan berat terutama bagi daerah dan kemampuan diri dan sumber daya pendidikannya kurang.

Dengan berpedoman kepada sejumlah tantangan yang diuraikan diatas tentunya perlu dikaji kembali strategi apa yang dapat dilakukan untuk mengembangkan pendidikan yang lebih memberikan harapan dimasa datang dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan visi dan misi pendidikan nasional yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan merespon perkembangan global pada abad ke 21 maka arah kebijakan pendidikan nasional kedepan tetap mengacu pada tiga hal yakni: (1) perluasan dan pemerataan layanan pendidikan yang bermutu, (2) peningkatan mutu pembelajaran dalam lembaga pendidikan, (3) perbaikan kapasitas dan manajemen pendidikan.

Apabila hal-hal tersebut diatas belum mendapat perhatian secara optimal, bisa dipastikan pelaksanaan desentralisasi pendidikan akan menemui berbagai kendala, apalagi sekarang pimpinan daerah kabupaten/kota kekuasaannya begitu besar sehingga banyak orang mengkhawatirkan bahwa pimpinan daerah di era otonomi daerah ini bagaikan raja-raja kecil yang segala kebijakan berada ditangannya. Jadi dalam upaya membangun system pendidikan yang bagus di daerah sangat tergantung bagaimana pemahaman pimpinan daerah tersebut.

E. Saran

Berdasarkan kondisi pendidikan di Indonesia tersebut, saran yang bisa penulis sampaikan terkait dengan peningkatan kualitas, relevansi dan pemerataan pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Mengapa kualitas pendidikan kita masih sangat rendah dibanding negara lain?. Yang perlu dibenahi disini adalah sistem pendidikan (penyesuaian kurikulum yang memenuhi standard pendidikan). Kita bisa bercermin dan belajar dari negara lain yang mempunyai sistem pendidikan yang masuk kategori terbaik di dunia, yaitu Finlandia,

- Jepang, Korea Selatan, Denmark dan Rusia. Bagaimana mereka mempersiapkan generasi muda mereka untuk sistem ekonomi abad -21 yang berbasis pengetahuan dan global.
2. Pemerintah Indonesia tidak hanya berkomitmen untuk meningkatkan kualitas lulusan politeknik dan akademi, tetapi juga meningkatkan jumlah perguruan tinggi vokasi, sehingga lulusannya dapat berkontribusi pada ekonomi Indonesia. Selain itu perubahan fundamental terhadap pendidikan vokasi melalui program revitalisasi pendidikan tinggi vokasi harus segera dilaksanakan. Program ini untuk meningkatkan relevansi pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri pengguna lulusannya.
 3. Dalam soal peningkatan akses terhadap pendidikan, aspek pemerataan adalah persoalan yang sangat penting. Secara faktual, terjadi ketimpangan antar penduduk dalam mengakses pendidikan. Ketimpangan terjadi dalam spektrum yang luas antar kelompok pendapatan, gender, dan daerah. Ini menunjukkan bahwa hasil-hasil pembangunan tidak dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerataan pendidikan dapat menjamin tercapainya pemerataan dalam jangka panjang. Alokasi penggunaan dana untuk pendidikan harus lebih diprioritaskan. Kebijakan pemerintah harus dibuat supaya pendidikan dapat lebih dirasakan langsung oleh masyarakat. Melalui program pemerataan pendidikan diharapkan dapat menciptakan sumber daya manusia yang produktif. Sumber daya manusia yang produktif merupakan modal yang paling menentukan dalam keberhasilan pembangunan jangka panjang. Selain itu efektifitas dan efisiensi penggunaan dana pendidikan harus dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah harus tegas menindak penyelewengan yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghifari, Handoko, Yani. *Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia Dengan Pendekatan Maqashid Indeks*. Volume 3 No.2. Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI. 2015
- Boy, Pradana. *Keruntuhan Kedaulatan Bangsa : Dampak Globalisasi Terhadap Kemandirian Ekonomi dan Politik*.
- Hall, D Joshua. *Educational Quality Matters for Development: A Model of Trade, Inequality, and Endogenous Growth*. Eastern Economic Journal, 43, (128–154), 2017.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan*. 2016
- Koscielniak, Helena, et al. *International Experiences As One Of Main Elements In Quality Education*. Obuda University Keleti Faculty of Business and Management 2015.
- Mariyanti, Tatik. *Ekonomi Mikro, Islam versus Konvensional*. Penerbit Universitas Trisakti. Jakarta .Cetakan Pertama. 2017.
- Musyaddad, Kholid. *Problematika Pendidikan di Indonesia*. Volume 4. 2013
- Syadiyah, Halimatus. *Kacaunya Pendidikan di Indonesia*. Universitas Negeri Semarang. 2015
- Sumar, Warni. *Kebijakan Pendidikan di Era Otonomi Daerah dan Implikasi dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. Universitas Negeri Gorontalo
- Suwanto, Edi.Muhammad Sudrajat. *Pengertian, Tujuan dan Ruang Lingkup Analisis Kebijakan Pendidikan Islam*. Universitas Ibn Khaldun, Bogor. 2009
- Tarigan, Robinson. *Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Pendapatan Perbandingan Antara Empat Hasil Penelitian*, Jurnal Wawasan Volume 11 No.3, Universitas Sumatera Utara. 2006
- Badan Pusat Statistik. *Publikasi Indeks Pembangunan Manusia*. 2016
- <http://www.masbied.com/2011/06/19/analisis-wacana-pendidikan-langkah-strategis-peningkatan-kualitas-pendidikan/>
- <http://worldtop20.org/2017-world-best-education-systems-1st-quarter-report>

<http://www.thejakartapost.com/academia/2016/12/18/indonesias-pisa-results-show-need-to-use-education-resources-more-efficiently.html>

<http://www.latimes.com/opinion/op-ed/la-oe-0318-doyle-finnish-schools-20160318-story.html>

Tribunnews.com diunduh tanggal 4 Februari 2018.